

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang pendidikan menjadi satu pokok bahasan yang sangat penting dalam pembangunan dan peradaban suatu bangsa. Alasannya, pendidikan diyakini menjadi komponen strategis dan mendasar untuk mendukung dan mendorong setiap upaya pembangunan dalam segala sektor, pendidikan bukan saja akan berpengaruh terhadap produktivitas suatu bangsa, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas, mortalitas, dan mobilitas masyarakat. Mobilitas adalah perubahan sosial yang akan menyebabkan akulturasi dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi pendidikan maupun agama. Seperti dijelaskan Fatah (2000) bahwa Pendidikan menjadi faktor penting dalam proses transformasi sosial suatu bangsa.

Proses terjadinya transformasi dan mobilitas sosial ataupun akulturasi dalam kehidupan masyarakat tersebut bukan harus dihindari melainkan sudah ada dan tidak bisa dihilangkan, karena Indonesia sendiri terkenal dengan bangsa yang majemuk dan beraneka ragam, hal ini berimplikasi pada setiap daerah di Indonesia termasuk di Jawa Barat sampai kepada kabupaten dan kota di seluruh wilayah propinsi Jawa Barat.

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia, dengan luas wilayah 29.275,82 km². Secara administratif pemerintahan, Jawa Barat punya 25 kabupaten dan kota, yang terdiri dari 16 kabupaten dan 9

kota, mencakup 535 kecamatan, 1.724 kelurahan, dan 3.939 desa. Jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan Susenas 2002 berjumlah 36,9 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 1999-2000 mencapai 2,17% per tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat disebabkan oleh dua hal, yakni pertumbuhan penduduk alamiah dan migrasi. Laju pertumbuhan yang disebabkan oleh migrasi lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk alamiah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat heterogenitas penduduk Jawa Barat yang cukup tinggi (PR, 28-11-03).

Tingkat heterogenitas atau kemajemukan penduduk yang tinggi rentan terhadap perpecahan dan konflik, seperti dikatakan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan bahwa:

Jawa Barat sebagai provinsi berbatasan dengan Jakarta tidak terlepas dari ancaman perpecahan. Pasalnya, suatu perpecahan di tengah masyarakat bisa timbul manakala berkembang sentimen kesukuan, agama, dan primordial yang terlalu berlebihan. Jika faktor tersebut sulit dicegah dan diantisipasi, upaya mempertahankan konsep persatuan dan kesatuan yang telah menjadi wawasan kebangsaan akan menjadi berat. Bahkan, dampak perpecahan tersebut tidak akan menguntungkan bagi kondisi Jawa Barat ke depan (www.pikiran-rakyat.com/cetak/1003/22/0305.htm).

Padahal Kemajemukan merupakan kekayaan bangsa Indonesia, tetapi selama tiga dekade terakhir ternyata mengalami 'keterpinggiran', dan bahkan 'keterpurukan' dalam wilayahnya sendiri. Sungguh suatu ironi bahwa keragaman yang merupakan unsur fundamental bagi tumbuh kembangnya suatu kebudayaan, ternyata kini menjadi benih-benih persaingan, perseteruan, konflik dan bahkan perpecahan di antara anak-anak bangsa sendiri, peristiwa

di Maluku, Sampit, Aceh merupakan sebagian dari contoh konflik sosial, melambangkan keterpurukan dan keterpinggiran tersebut.

Jawa Barat memiliki tingkat kemajemukan beragama yang cukup tinggi. Interaksi antar umat beragama maupun diantara umat seagama memiliki potensi melahirkan berbagai problema sosial yang kadang sulit diselesaikan. Belum lagi ada pihak lain yang memang sengaja bermaksud mengeruhkan suasana kesatuan dan kerukunan. Meskipun secara umum, Jawa Barat memiliki tingkat indeks pendidikan yang terus meningkat, belum mampu menjamin terbebasnya dari konflik dan perselisihan.

Tidak jauh beda dengan Garut, sebagai bagian dari propinsi Jawa Barat, memiliki kemajemukan agama yang tinggi juga, sehingga rentan terhadap timbulnya perpecahan, konflik ataupun perselisihan antar agama dan antar golongan seagama. Tawuran antar pelajar memang ada pengaruh dari kondisi secara umum terjadi meskipun tidak sehebat tawuran pelajar di Jakarta, konflik antar golongan dalam kerangka fanatisme ideology dan golongan yang tinggi, konflik antar kampung yang mungkin dipicu oleh pihak ketiga. Bahkan di Banyuwangi tahun 1999-2003 termasuk tingkat konflik antar kampung/desa yang cukup tinggi, hampir setiap tahun terjadi konflik antar kampung terutama di wilayah Banyuwangi Barat, hanya tahun 2003 yang menurut catatan Polsek tidak terjadi keributan besar (frekuensinya bisa diselesaikan). Konflik antar kampung Cigasty, Corenda, Patrol di wilayah Leles seringkali terjadi. Perselisihan antar golongan (ideologi) kadang tak bisa dihindari di beberapa wilayah di Garut. Perusakan toko dan supermarket

milik orang China dan peristiwa-peristiwa lainnya. Itu semua merupakan kondisi yang cukup mengerikan bagi pembangunan sumber daya manusia yang demokratis di Garut khususnya, Jawa Barat dan Indonesia secara umum. Seperti diungkapkan oleh Setiawan (2003) bahwa : “perpecahan dan konflik akan mudah dipicu oleh sentimen kesukuan, fanatisme agama yang sempit, belum berbaurnya WNI keturunan sebagai bangsa Indonesia secara utuh” (Parahyangan, 11-8-2003).

Padahal tahun 1999, indeks pendidikan Jabar tercatat 73,90 dan pada 2002 menjadi 76,51 atau naik 2,61%. Begitu juga dengan Garut, Indeks pendidikan kabupaten Garut sebesar 78,31 pada 1999 dan 78,69 pada 2002 (berarti naik 0,38), termasuk sedang namun tergolong dinamis, yaitu indeks pendidikannya termasuk sedang (dalam klasifikasi UNDP) namun terus mengalami peningkatan pesat, baik tingkat pertumbuhan dan juga *ranking* indeks pendidikannya. Jumlah penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) termasuk sedang, APM menurut UNDP maupun APM Jawa barat termasuk kategori tinggi. Jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun) termasuk sedang. Tingkat APM menurut UNDP maupun Jawa Barat termasuk kategori sedang. Untuk tingkat SMU dan SMK, jumlah penduduk umur 16-18 tahun atau usia produktif sekolah untuk kabupaten Garut termasuk sedang. APM-nya menurut UNDP tergolong rendah. *Ranking* indeks pendidikan pada 1996 pada peringkat ke-12 dan menjadi peringkat ke-9 pada 1999 di antara daerah lainnya di Jawa Barat (PR, 16-12-2003).

Kenaikan indeks tersebut baru sebatas kuantitas indeks, semestinya ditunjang dengan kenaikan kualitas manusianya, siswa sebagai anak didik yang mampu mengembangkan potensi dirinya dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bangsa dan negaranya yang demokratis. Oleh karena masih lemahnya pendidikan kita dalam mengembangkan potensi siswa baik kognitif, afektif maupun psikomotornya. Banyak kasus dalam dunia pendidikan formal (sekolah) di Kabupaten Garut khususnya, bagaimana siswa mencoba bunuh diri dari mulai siswa SD sampai siswa SMK/STM karena tidak mampu membayar iuran atau uang praktek, tawuran antar pelajar seperti STM dan SMU/MAN. Bahkan jendela media massa yang semakin terbuka lebar seolah-olah memberikan stimulus pada masyarakat pelajar untuk mengikuti contoh-contoh tersebut.

Fakta dan kenyataan diatas, menunjukkan bahwa masih lemahnya proses pendidikan menyentuh potensi kognitif, afektif dan psikomotor siswa. Dengan demikian perlu diambil solusi-solusi yang mampu mengimbangi kemajuan indeks pendidikan di atas. Bila demikian, harapannya akan berdampak pada pengembangan keterampilan intelektual siswa (*intellectual skills*) dan keterampilan sosial siswa (*social skills*) dalam setiap aspek kehidupannya. *Intellectual skills* dalam kerangka ini, adalah kemampuan mengembangkan pola-pola berpikir positif, kritis, kreatif dan inovatif, sedangkan *social skills* adalah implikasi dari *intellectual skills* tersebut, seperti memiliki sikap-sikap toleran, kebersamaan sampai pada persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu berdiri di atas perbedaan sesuai nafas Bhineka

Tunggal Ika. Bila dunia pendidikan/pembelajaran telah mampu menyentuh potensi-potensi tersebut ditunjang dengan khasanah religius, akan mampu mengurangi konflik, perselisihan, perseteruan serta hal-hal yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

SMUN I Leles adalah salah satu sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Garut. Kondisi guru (tenaga pendidik), karyawan dan siswanya berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan Jawa Barat khususnya, meskipun didominasi oleh etnik Sunda. Bahkan guru IPS-Sejarah adalah berasal dari etnik Jawa, tetapi komunikasi diantara mereka berjalan harmonis tanpa membedakan dari daerah atau suku tertentu. Kondisi lain yang mewarnai masyarakat sekolah di SMUN I Leles adalah adanya berbagai golongan seagama yang sangat rentan terhadap perselisihan, seperti Persis, NU dan Muhamadiyah atau Islam Sejati, selain lingkungan wilayah yang sering terjadi konflik antar kampung yang dimulai dari peran seorang "Jeger" (orang yang ingin dianggap jagoan) sering memicu konflik-konflik tersebut di wilayah Garut.

Untuk mengantisipasi kenyataan dan peristiwa-peristiwa di atas SMUN I Leles sebagai salah satu institusi pendidikan memiliki peranan penting dalam menyiapkan dan mengarahkan siswanya menjadi generasi yang mampu berpikir jernih dan berwawasan tinggi dalam mengembangkan sikap-sikap demokratis dalam kehidupannya.

Sehubungan dengan itu, pembelajaran IPS-Sejarah memiliki peranan penting dalam membangun karakter bangsa (*nations and character building*)

di Kabupaten Garut khususnya yang berkualitas yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan mampu bersaing secara global. Pembelajaran merupakan wahana siswa melakukan interaksi dalam kehidupan akademis untuk mengembangkan potensi dirinya siswa, agar mampu menjadi generasi yang memiliki partisipasi tinggi bagi kehidupan bangsa dan negaranya serta mampu bersaing secara internasional. Sebab menurut UNDP bahwa wujud pembangunan pendidikan adalah melalui peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), sikap (*attitudes*), dan produktivitas (*productivity*).

Pembelajaran Sejarah mengandung makna yang sangat penting dalam membentuk karakteristik masyarakat dan bangsa, seperti yang tercermin dalam tujuan dan tradisi PIPS adalah berupaya membentuk (*good citizenship*), Pendidikan Sosial (*Social Education*) dan Pengembangan Berpikir Reflektif (*Reflective Inquiry*). Selain itu “pembelajaran PIPS memiliki misi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari” (Kosasih, 1994:1). Oleh sebab itu melalui PIPS siswa diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang berguna bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. PIPS harus mampu mengembangkan *knowledge and understanding*, aspek sikap dan nilai siswa tentang dunia dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Aspek sikap berkaitan dengan bekal mengenai dasar-dasar etika dan norma yang nantinya menjadi orientasi nilai dalam kehidupannya di masyarakat, sedangkan aspek keterampilan meliputi



keterampilan sosial dan keterampilan intelektual yang dimaksudkan adalah siswa tanggap terhadap permasalahan sosial dan mampu bekerjasama dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bloom menyebutkan bahwa 'keterampilan yang harus diajarkan melalui pembelajaran IPS adalah keterampilan berpikir, keterampilan akademis, keterampilan sosial dan keterampilan meneliti' (Mulyono, 1985:15).

Sejarah sebagai bagian dari IPS memiliki sumber belajar yang luas sekali di kelas ataupun di luar kelas, antara lain adalah kehidupan masyarakat dengan ragam ceritanya atau lingkungan akademis siswa sendiri. Kelangkaan guru menggunakan sumber belajar lingkungan membuat pembelajaran Sejarah menjadi begitu monoton dan terpaku pada buku sumber semata. Salah satu sumber belajar sejarah adalah materi isu-isu kontroversial yang diharapkan mampu melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap demokratis siswa.

Perselisihan dan konflik yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan di wilayah Indonesia pada umumnya, pada dasarnya berawal dari isu-isu yang berkembang di masyarakat yang biasanya menimbulkan pro dan kontra yang kemudian menjadi sumber terjadinya perseteruan, perselisihan dan konflik.

Isu-isu tersebut tentunya tidak bisa dihindari dalam kehidupan siswa (masyarakat), tetapi akan tetap ada dan berkembang. Dengan demikian agar siswa terbiasa dan tidak tabu lagi dalam menghadapi isu dan lantas menjadi pertikaian, maka isu-isu kontroversial perlu untuk dibelajarkan oleh guru

dalam PIPS dan Sejarah khususnya. Siswa dilatih untuk ada dalam perbedaan (pro dan kontra), bersikap toleran serta mampu mencari solusi-solusi dari isu-isu yang berkembang tersebut. Selain itu implikasinya terhadap IPS–Sejarah akan memberikan image bahwa pembelajaran IPS-Sejarah bukan lagi pelajaran yang monoton dan membosankan seperti yang terjadi pada kenyataannya di lapangan.

Sebagai mata pelajaran wajib di SMU, pembelajaran Sejarah mengemban misi yang sangat strategis dalam pembangunan manusia Indonesia menuju terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, cerdas, menguasai teknologi dan mampu hidup dalam tataran masyarakat global. Menurut Tilaar, (1999:351) bahwa “kehidupan masyarakat global menuntut setiap orang untuk mampu berpikir cepat dan jernih, sehingga mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan tantangan yang berkembang dengan cepat”. Selanjutnya dikatakan bahwa “kehidupan global juga telah menghadirkan tantangan baru kepada setiap masyarakat menyangkut nilai-nilai kebangsaan dan identitas bangsa sendiri” (Tilaar, 1999:353). Kartodirdjo, (1982:66-80), menjelaskan bahwa : “Mata Pelajaran Sejarah yang diberikan pada jenjang SMU berorientasi pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai nasionalisme di kalangan peserta didik, serta diarahkan pada terwujudnya *self reflection* di kalangan peserta didik dengan berbasis pada nilai-nilai Sejarah”. Melalui pelajaran Sejarah diharapkan tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme di kalangan peserta didik,



sehingga mereka nantinya menjadi tiang penyangga dan pembangunan nasional yang telah, sedang dan terus dilakukan.

Pembelajaran Sejarah khususnya, selama ini kurang menyentuh potensi berpikir dan sikap siswa, sehingga siswa hanya berkembang sebatas kemampuan kognitif tingkat rendah saja. Padahal esensi Pembelajaran Sejarah seharusnya dikembangkan oleh guru dengan menciptakan iklim demokratis di kelas agar siswa mampu mengembangkan potensi dirinya sehingga siswa dapat memahami dengan baik identitas diri dan bangsanya serta mampu mengembangkan potensi berpikirnya dalam mengkritisi berbagai perkembangan global saat ini, apalagi peristiwa sejarah banyak yang memiliki peristiwa kontroversi sehingga bisa dijadikan sebagai bahan bagi guru dalam melatih potensi berpikir siswa berdasarkan sumber, pengetahuan dan argumentasi yang mereka pahami.

Menurut Sjamsuddin (1999:15) bahwa : "melalui sejarah siswa bukan hanya memahami apa yang telah terjadi, melainkan pula mengapresiasi masa lalu". Siswa dituntut untuk mengalami empati dan mengapresiasi apa yang menjadi tujuan-tujuan, prestasi-prestasi dan penderitaan-penderitaan orang yang dikisahkan dalam sejarah. Reaksi-reaksi emosional dan sentimental tersebut dapat menentukan tingkah laku di masa yang akan datang.

Hasan (1999:7) mengemukakan bahwa :

Kemampuan dan sifat kepribadian tersebut dikembangkan melalui kemampuan berpikir kronologis dan sikap toleran. Menurutnya kondisi pembelajaran sejarah yang berkembang di dunia persekolahan dewasa ini, dapat dideskripsikan sebagai berikut : bahwa merupakan suatu kenyataan yang harus diakui proses pengembangan kemampuan berpikir kronologis yang merupakan kemampuan berpikir dasar dalam

sejarah maupun sikap toleransi yang dikembangkan baru sebagai “*nurturant effect*” dan bukan sebagai suatu “*instructional effect*” proses pengajaran sejarah yang terjadi tidak memberi kesempatan bagi guru untuk merancang pengembangan kualitas kesejarahan ini dalam suatu proses pendidikan yang adekuat (Hasan, 1999:10).

Kondisi pembelajaran yang terjadi cenderung kurang menarik dan membosankan sehingga siswa mengalami kejenuhan dalam belajar. Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kondisi tersebut antara lain : 1) anggapan yang keliru dalam diri siswa bahwa pelajaran IPS-sejarah hanya hapalan saja, 2) model dan metode pembelajaran yang dikembangkan oleh guru masih bersifat indoktrinatif dan *teacher dominated*, 3) materi pelajaran terlalu syarat dengan fakta, peristiwa dan konsep yang tersaji secara kronologis sehingga tidak menantang siswa, 4) kemampuan evaluasi yang sementara masih berkonsentrasi pada pengukuran aspek kognitif saja.

Padahal dikatakan oleh Kuntowidjoyo (1997:3-4) bahwa :

Pengajaran sejarah pada setiap tingkatan seharusnya mempunyai pendekatan yang berbeda sehingga tidak membosankan akibat banyaknya kesamaan dan pengulangan. Untuk tingkat SMU, ia mengatakan bahwa pengajaran sejarah sebaiknya diberikan secara kritis mengingat siswa sudah mampu bernalar. Siswa diharapkan sudah bisa berpikir mengapa sesuatu terjadi, apa sebenarnya yang terjadi dan ke mana arah kejadian-kejadian tersebut.

Lebih lanjut, Hasan (1999: 9) menjelaskan bahwa :

Pengajaran sejarah seharusnya dikembangkan dengan menempuh tiga pendekatan yaitu : 1) keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa, 2) pemahaman dan kesadaran akan karakteristik cerita sejarah yang tidak pernah bersifat final, 3) perluasan tema sejarah politik yang menguasai sebagian besar isi mata pelajaran sejarah saat ini dengan tema sejarah sosial, budaya, ekonomi dan teknologi.

Untuk menciptakan kondisi tersebut maka guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam memilih dan menentukan metode atau strategi pembelajaran. Guru diharapkan mampu meningkatkan potensi kemampuan akademis dan keterampilan belajar siswa dengan memberikan dorongan terhadap perkembangan psikologis, akademis dan sosial siswa secara optimal.

Model pembelajaran cara konvensional yang menekankan pada *teacher centered* daripada *student centered* dianggap sudah usang dan ketinggalan zaman karena lebih banyak diwarnai dengan ceramah, guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Seperti dijelaskan Suwarma (1991:5) bahwa 'kondisi IPS di kita dewasa ini lebih diwarnai oleh pendekatan konvensional yang menekankan model belajar konvensional yang banyak diwarnai ceramah, sehingga kurang mampu merangsang siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar'.

Pembelajaran IPS semestinya diarahkan pada upaya pengembangan iklim yang kondusif bagi siswa untuk belajar sekaligus melatih pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan selama pembelajaran itu berlangsung. Berdasarkan tuntutan tersebut, maka guru Sejarah diharapkan untuk lebih mampu mendayagunakan dan memberdayakan kemampuan yang ada dalam dirinya, kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang mengarah pada pengembangan *intellectual skills* dan *social skills*. Seperti dijelaskan Wahab (1998:9) bahwa :

PIPS akan menghasilkan warga negara dan warga masyarakat yang berkualitas (*vital socio civic qualities*) pada anak muda kita yaitu yang dapat melakukan tugas-tugas kemasyarakatan dengan terampil dan dilakukan dengan cermat (*socially intellegent*) oleh karena

dipentingkan dalam rangka reorientasi dan revitalisasi itu bukan hanya sekedar pengetahuan tentang partisipasi siswa sebagai anggota masyarakat akan tetapi yang lebih diharapkan adalah partisipasi aktif dengan kualitas partisipasi yang tinggi.

Apa yang kemudian disampaikan dalam kegiatan konvensional di kelas oleh guru ternyata mengandung banyak peristiwa yang dilontarkan pada siswa yang kedudukan peristiwa tersebut masih belum jelas adanya seiring perubahan peta politik dan globalisasi reformasi saat ini. Berdasarkan itu, maka apa yang disampaikan oleh guru merupakan isu-isu. Bila isu-isu dibahas di kelas dalam pembelajaran Sejarah khususnya, nampaknya akan lebih menarik bagi kondisi pembelajaran siswa, dan akan lebih melibatkan siswa dalam mengembangkan gagasan, opini dan aktivitasnya dalam mencari dan memecahkan ataupun menemukan solusi dari isu-isu tersebut.

Pembelajaran Sejarah akan lebih memberikan makna bagi pengembangan kemampuan berpikir siswa, bila berangkat dari pengetahuan dan pengalaman siswa serta diciptakan dalam iklim yang demokratis dan tidak memasung kreatifitas berpikir siswa. Di ungkapkan oleh Suwama (1991) bahwa :

Kondisi pembelajaran PIPS di sekolah belum mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi peserta didik. Hal ini disebabkan pula karena guru PIPS belum mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik secara optimal. Padahal sifat dari pembelajaran PIPS memberikan pengetahuan fungsional, syarat dengan suasana dialog kreatif dan menumbuhkembangkan sikap sadar lingkungan.

PIPS memiliki potensi bagi upaya pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa melalui penciptaan iklim belajar siswa aktif kritis, kreatif, terbuka, fungsional dan aplikatif. Melalui pembelajaran isu-isu kontroversial

diharapkan mampu memberikan tantangan bagi siswa dalam upaya mengembangkan ide, gagasan dan pemikiran-pemikiran yang kritis tapi tetap konstruktif dan mengembangkan sikap demokratis. Pada dasarnya isu-isu kontroversial lebih mampu memberikan interes bagi siswa dalam upaya mengungkapkannya dengan versi dan pengetahuan serta pengalaman yang ia miliki. Peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pembelajaran Sejarah di SMU bisa diangkat sebagai sumber pembelajaran bagi siswa dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

Berdasarkan paparan itu, yang menjadi persoalan adalah apakah proses pembelajaran yang dimotori guru selama ini telah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa?, serta bagaimanakah *Isu-isu Kontroversial* dalam Pembelajaran IPS-Sejarah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SMU?. Menarik untuk diteliti mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran IPS-Sejarah dengan mengangkat materi pembelajaran isu-isu kontroversial dalam kapasitas pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa SMU.

B. Fokus dan Batasan Permasalahan

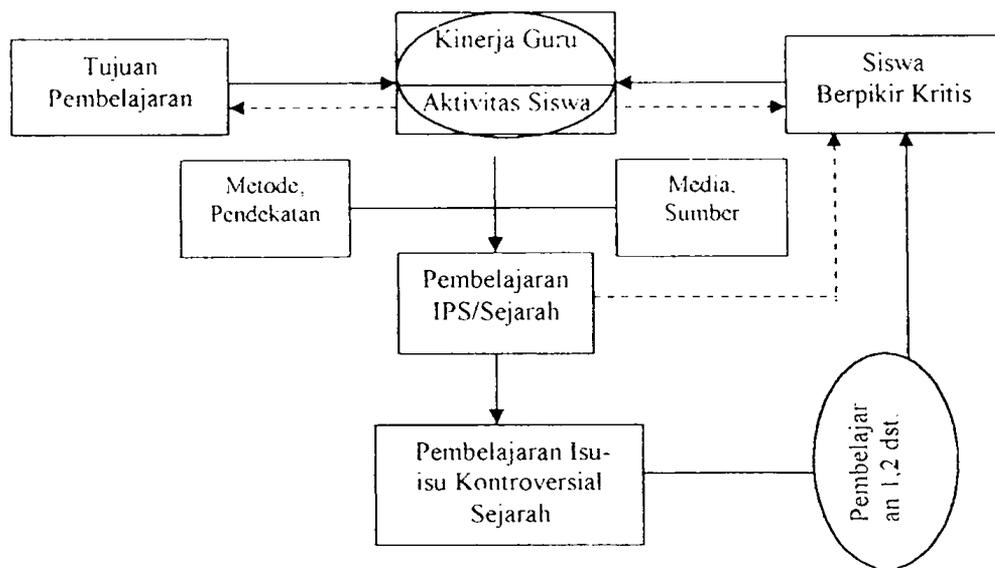
Berdasarkan pembahasan di atas, yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah "*Apakah Isu-isu Kontroversi dalam PIPS mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SMU*".

Secara umum bahwa pembelajaran IPS-Sejarah masih membosankan sehingga siswa cenderung kurang antusias dalam mempelajari Sejarah, dan kurang mampu mengembangkan pendapat dan ide-idenya, hal ini merupakan

tantangan bagi pendidikan IPS juga para praktisi dan peneliti PIPS di lapangan. Untuk memberikan kejelasan dan arah dalam penelitian ini, maka permasalahan diuraikan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembelajaran PIPS (Sejarah) biasanya ditampilkan ?
2. Bagaimana Apabila Pendekatan Isu-isu Kontroversi dalam PIPS (Sejarah) ditampilkan oleh guru dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa ? Bersediakah ?
3. Apakah Isu-isu Kontroversi dapat merangsang dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa?
4. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran Sejarah melalui pendekatan Isu-isu Kontroversi ?

Secara sederhana permasalahan dalam penelitian tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Paradigma Penelitian

C. Verifikasi Konsep

1. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis

Perubahan yang cepat dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik menyangkut perubahan politik, ekonomi, sosial, hukum, kebudayaan dan seterusnya merupakan tantangan yang berarti bagi setiap individu untuk berusaha mengimbangnya. Menghadapi gejala multidimensi ini, pengembangan kemampuan berpikir kritis dalam diri siswa sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai problem yang muncul. Untuk hal tersebut guru PIPS dituntut profesionalismenya dalam mendorong dan mengembangkan pembelajaran yang menuju kearah pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa dan memberikan motivasi belajar tinggi.

Menurut Hanna (Hasan,1996:42), menjelaskan bahwa pengembangan berpikir kritis dapat dilaksanakan melalui Asas ECA (*Expanding Community Approach*) dengan langkah sebagai berikut :

- a. Mulai belajar dari bahan pelajaran yang dekat dan sederhana di sekitar siswa ke yang lebih luas dan kompleks.
- b. Menapak dari jenjang yang serba faktual ke jenjang abstraksi
- c. Memikirkan segala sesuatu yang dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu.

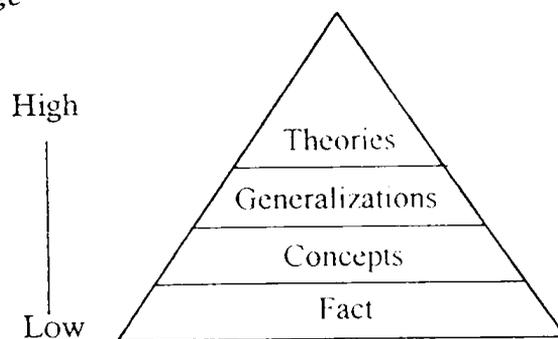
Menurut Dewey (Somantri, 2001:183-184) menjelaskan bahwa keterampilan dan dimensi berpikir antara lain : '(a) mengajukan dan merumuskan masalah, (b) merumuskan hipotesis, (c) mengumpulkan data, (d) menafsirkan dan menganalisis, (e) mengkomunikasikan kesimpulan'.

2. Pembelajaran PIPS-Sejarah

Pembelajaran berasal dari kata belajar. Secara umum belajar merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai akibat dari upaya-upaya yang dilakukannya. Perubahan-perubahan tersebut tidak disebabkan oleh keletihan, kematangan ataupun karena mengkonsumsi obat tertentu.

Menurut Barlow (1985) (Syach, 2000:90) menjelaskan bahwa “belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progressif”. Hintzman (Syach, 2000;90), menjelaskan bahwa “belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme (manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut”.

PIPS merupakan penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, dimana disiplin ilmu-ilmu sosial berisi kajian kehidupan manusia serta lingkungannya, oleh sebab itu pembelajaran PIPS banyak diangkat bahannya dari dengan urutan fakta, konsep, generalisasi dan teori. Seperti yang dijelaskan Woolever & Scott, (1987:93) *“Figure Level's of Knowledge”*



Gambar 1.2. Figure Level's of Knowledge

Menurut Kartodirdjo (1982:66-80) :

Mata Pelajaran Sejarah yang diberikan pada jenjang SMU berorientasi pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai nasionalisme di kalangan peserta didik, serta diarahkan pada terwujudnya *self reflection* di kalangan peserta didik dengan berbasis pada nilai-nilai sejarah.

Bahwa “melalui Pelajaran Sejarah siswa akan diperkenalkan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang mengiringi terbentuknya masyarakat dan bangsa di mana mereka hidup saat ini” (Hasan, 1996:24). Melalui Pelajaran Sejarah diharapkan tumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme di kalangan peserta didik, sehingga mereka nantinya menjadi tiang penyangga dan pengendali pembangunan nasional yang telah, sedang dan terus dilakukan.

Menurut Crosby (Cheppy, 1986:14), bahwa “Pendidikan IPS merupakan studi yang berhubungan dengan masalah-masalah bagaimana manusia mengembangkan satu kehidupan yang lebih baik, baik dalam arti untuk dirinya sendiri maupun untuk sesamanya”. Melalui pembelajaran PIPS, siswa dibekali untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya.

3. Pembelajaran Isu-isu Kontroversi dalam PIPS

Pembelajaran Isu-isu Kontroversial (*Teaching Controversial Issues*) adalah pembelajaran dalam PIPS dengan berupaya mengangkat berbagai isu-isu yang kontroversial yang kadang menimbulkan konflik pendapat atau perbedaan persepsi terhadap isu-isu tersebut, yang kemudian diangkat sebagai materi pembelajaran dari sudut pandang siswa. Sejalan

dengan penjelasan ini dalam NCSS dijelaskan bahwa "*Controversial Issues as an instructional strategy*" (Cox, 1977; Gross, 1952; Muessig, 1975). Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah bahwa pembelajaran isu-isu kontroversial bisa dijadikan sebagai sebuah strategi atau pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran Sejarah dengan materi-materi yang mengandung kontroversial.

Isu-Isu Kontroversial adalah masalah-masalah yang kedudukannya masih diperdebatkan, atau dipertentangkan dalam hal perbedaan pendapat terhadap suatu objek terutama di kalangan para ahli. Perbedaan pendapat dalam memandang suatu peristiwa atau suatu objek kajian tersebut bisa diangkat dalam pembelajaran dengan maksud menciptakan kehidupan dan sikap demokrasi pada diri peserta didik serta mengembangkan potensi berpikirnya tanpa campur tangan dari guru atau doktrin-doktrin yang mematikan kreativitasnya.

Clark (1973:36) menjelaskan bahwa "*Controversial Issues are important in the real life of community*". Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa "*controversial issues give pupils a chance to learn the skills and attitudes necessary for coping with the problems of modern society and for the understanding the democratic process*". Dengan demikian sesuai makna IPS bahwa sumber dan media belajar IPS paling banyak adalah dalam lingkungan kehidupan siswa itu sendiri. Penerapan pendekatan kontroversi bagi PIPS merupakan pendekatan yang mengarah pada pengembangan pendidikan demokratis, *critical and creative thinking*,

sehingga hal ini sangat penting bagi guru untuk mengaplikasikannya di dalam kelas, sesuai dengan tujuan dan tradisi PIPS.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kemampuan guru dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam Pembelajaran Sejarah;
- b. Mengetahui bagaimana guru mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui Pembelajaran Isu-isu Kontroversial;
- c. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam membelajarkan Isu-isu Kontroversial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para peneliti atau guru dalam upaya mencari dan meneliti berbagai strategi yang lebih mengarah pada pengembangan kapasitas dan potensi kemampuan berpikir yang dimiliki oleh siswa.
- b. Sebagai masukan bagi guru IPS untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kinerjanya dalam pembelajaran IPS yang lebih bersifat demokratis dan humanis.